

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan agen dan prinsipal yang saling berkaitan. Prinsip yang utama dari teori ini ialah adanya kaitan kerja antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang itu sendiri yaitu (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astaria,2011).

Menurut Mardiasmo (2004) dalam Nurillah (2014), bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh dua puluh dua teori keagenan. Dalam proses keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui wakil-

wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011).

## **2.1.2 Laporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Nurillah (2014) laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. SAKD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan manajer keuangan pemerintah melalui formulasi dan pengembangan SAP. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas SAKD diperlukan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP No.1).

PSAP No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan ialah bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* (Defitri,2014).

Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta materi yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Semua

laporan keuangan tersebut merupakan catatan informasi keuangan entitas dalam suatu periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah.

#### **2.1.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP, “Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, agar komponen laporan yang disajikan terkait dengan jenis laporan dan elemen-elemen informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki kriteria tersendiri. Menurut PP No. 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Jadi dapat dinyatakan laporan keuangan dikatakan bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut SAP adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan berkualitas, yaitu:

1. Relevan (*relevance*). Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial.
2. Andal (*reliability*). Keandalan suatu informasi dalam laporan keuangan artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan yang material. Fakta dalam informasi harus disajikan secara jujur dan adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
3. Dapat dipahami (*comparability*). Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan keuangan. Informasi yang

disajikan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan pengguna

4. Dapat dibandingkan (*comparability*). Suatu informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan pemerintah lain. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal maupun secara eksternal. Perbandingan dengan cara internal dapat dilakukan bila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang ditetapkan dalam PP No. 71 tahun 2010, itu berarti pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menghasilkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila belum sesuai dengan perundang-undangan, maka bisa saja mengakibatkan kerugian daerah yang besar, kelemahan suatu administrasi, pemborosan yang luar biasa, waktu yang tidak efisien dan efektif.

### **2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

#### **2.1.3.1 Pengertian SAKD**

Menurut permendagri No 64 tahun 2013 bahwa:

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SAKD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Rasdianto (2013) dalam Komalasari (2016) mengatakan bahwa “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Berdasarkan permendagri No. 64 Tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, akuntansi aset dan penyajian laporan keuangan.

Halim dan Kusufi (2012:84) “akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah data *input* (masukan) adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan *output* (keluaran) adalah laporan keuangan”. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan.

### **2.1.3.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Ihsanti (2014) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya”. Sistem akuntansi keuangan daerah yang lemah dapat menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan dalam pembuatan keputusan.

Menurut Permadi (2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan SAKD adalah :

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya
3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

Dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator tersebut menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian (Irwan,2011).

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa proses pokok dalam SAKD adalah:

1. Pengidentifikasian

Tahap ini merupakan tahap yang paling pertama dari tahapan siklus akuntansi yakni dengan cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan menangkap peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi.

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan salah satu fungsi penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak tepat ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang salah atau tidak tepat.

3. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual* basis untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

4. Pelaporan

Setelah semua proses selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

### **2.1.3.3 Tujuan SAKD**

Setiap entitas laporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan

upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode laporan. Menurut Halim dan Kusufi (2012:39) bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan & pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Secara spesifik hasil dari SAKD ialah adanya suatu laporan keuangan daerah. Tujuan laporan keuangan daerah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk menunjukkan keakuntabilisan suatu entitas yang ditujukan kepada sumber daya yang dipercayakan.

#### **2.1.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah**

Kompetensi adalah perspektif kemampuan dan pengetahuan manusia, khususnya kemampuan untuk berbagi kebutuhan dalam bisnis dengan meminimalisasi biaya dan mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan tidak lebih,

bukan kurang. Kompetensi menurut perpres No.38 tahun 2017 adalah “standar kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan jabatan”.

Menurut Moeheriono (2009) “kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Humairoh (2013) dalam Fauziah (2019), sumber daya manusia akan bekerja secara optimal jika instansi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Sumber daya aparatur pemerintah yang tidak berkompeten dalam menyusun laporan keuangan akan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil bahwa “Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Dalam lingkup di pemerintah, sumber daya manusia pemerintah daerah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Penempatan SDM sesuai dengan keahliannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu pemerintah harus melakukan pelatihan seiring dari perkembangan ilmu sehingga kompetensi aparatur pemerintah akan meningkat.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, aparaturnya harus mempunyai kompetensi agar dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adanya aparatur yang kompeten akan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, karena yang bersangkutan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang laporan keuangan yang dibuat, dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka diharapkan

semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa aparatur daerah yang kompeten adalah aparatur daerah yang mempunyai:

1. Pengetahuan (*knowledge*) mengenai tanggung jawab pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan bidang-bidang tertentu.
2. Aparatur daerah harus mempunyai keterampilan/kemampuan (*skill*). Hal ini penting karena merupakan suatu upaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan pemerintah kepada seseorang aparatur dengan baik dan maksimal.
3. Disamping pengetahuan dan keterampilan aparatur daerah, hal yang perlu diperhatikan juga adalah sikap (*attitude*) aparatur daerah.

### **2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi (Yuliyati:2018).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada

pelayanan publik.

Secara umum pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak positif karenamemberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya. Jadi jika teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Argo:2015).

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar.

Menurut Setyowati, Isthika, & Pratiwi (2016) dalam Ningrum (2018), pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Komalasari (2016) untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan e-government sangat penting dalam memanfaatkan teknologi informasi yang baik.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/ Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Wulandari, Rahmat (2021)  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi Kasus : SKPD Kota DKI Jakarta)	X1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  X2: Kompetensi Sumber Daya Manusia  X3: Sistem Pengendalian Intern	Regresi Linier Berganda	SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan antara system pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Indrayani, Widiastuti (2020)  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Modernisasi  (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Klaten).	X1 : Sistem akuntansi keuangan daerah  X2: Sistem pengendalian internal  X3 : Kompetensi SDM	Analisis Regresi Berganda	Penerapan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

No.	Nama Peneliti/ Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
3.	<p>Fauziyah (2019)</p> <p>Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)</p>	<p>X1 : SAKD</p> <p>X2 : Kompetensi aparatur pemerintah</p> <p>X3 : Pemanfaatan teknologi informasi</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>SAKD pengaruh positif dan signifikan antara SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan antara SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh antara SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang.</p>
4.	<p>King, M. (2019)</p> <p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>(Survei Pada SKPD Wilayah Kabupaten)</p>	<p>X1 : SAP</p> <p>X2 : Sistem pengendalian internal</p> <p>X3 : Kompetensi aparatur pemerintah</p>	<p>Regresi Berganda</p>	<p>Secara parsial, penerapan SAP maupun sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, kompetensi berpengaruh terhadap kualitas lap. keuangan</p>

No.	Nama Peneliti/ Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
5.	Ramadhani (2018) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staff Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 :Kompetensi SDM X2 : Penerapan standar akuntansi keuangan daerah X3 :Pemanfaatan teknologi informasi	Regresi Linier Berganda	Kompetensi SDM dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6.	Wati, Herawati, Sinarwati (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X1 : Kompetensi SDM X2 : SAP X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Regrasi Linier Berganda	Secara parsial maupun bersama-sama: Kompetensi Sumber Daya Manusia , penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
7.	Nurillah (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	X1 : Kompetensi SDM X2 : Penerapan SAK X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Regrasi Linier Berganda	Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan daerah. penerapan SAK berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi intern Terhadap kualitas laporan keuangan daerah

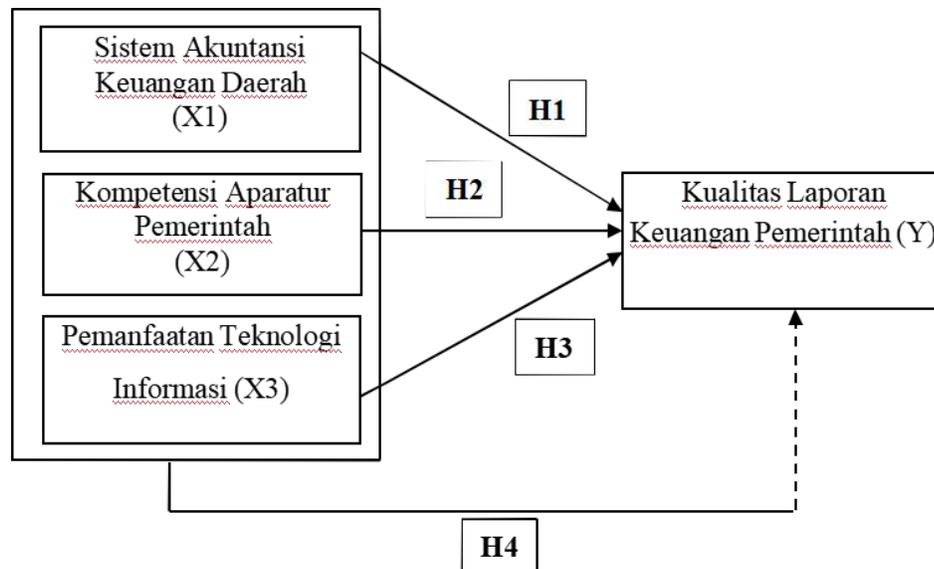
No.	Nama Peneliti/ Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
				System pengendalian intern berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah.
8.	Ihsanti (2014)  Pengaruh Kompetensi SDM Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).	X1 :Kompetensi SDM  X2 :Penerapan SAKD	Regresi Linier Berganda	Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Sedangkan penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan Terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
9.	Andini, Yusrawati (2016)  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Empat Lawang SUMSEL.	X1 : Kompetensi SDM  X2 : SAKD	Regresi Linier Berganda	SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang, baik secara parsial maupun bersama-sama
10.	Akhmad (2017)  Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang.	X1: Pemanfaatan teknologi informasi  X2 :Pengawasan keuangan	:Regresi Linier Berganda	Efektivitas penerapan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh signifikan secara terhadap ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Enrekang.

(Sumber: beberapa penelitian terdahulu, tahun 2014 sampai 2021).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antar variabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2021:95) “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan secara teoritis sehingga perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen”.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

#### Keterangan :

-----> = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

————> = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

### 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka

pemikiran, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI.
- H2: Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI.
- H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI.
- H4: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI.